



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**NOMOR 2595/DJU/SK.DL1.10/VI/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS  
PELAYANAN HUKUM DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 dan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 199/ DJU/ SK/ DL.1.10/I/ 2026, setiap pengadilan diharapkan mampu memberi akomodasi dan layanan yang layak bagi seluruh penyandang disabilitas;
  - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan adanya akomodasi yang layak sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. bahwa untuk keseragaman pemahaman mengenai pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu disosialisasikan pedoman yang sudah ditetapkan tersebut dalam suatu bimbingan teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b, dan c, maka perlu ditunjuk nama-nama dalam keputusan ini untuk menjadi peserta dalam bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas.



- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 tentang Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
  8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 432/DJU/PS.00/4/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Survei Layanan Disabilitas di Pengadilan Negeri.

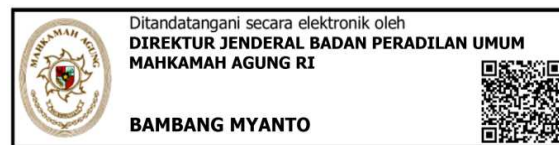
#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.
- Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2026.
- Peserta dibebaskan tugas dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 8 s.d 10 Juli 2026.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2026, Nomor DIPA-005.03.1.097450/2026 tanggal 2 Desember 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada 19 Juni 2026



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung



Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Nomor 2595/DJU/SK.DL1.10/VI/2026  
Tanggal 19 Juni 2026

**PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, S.H., M.H. NIP. 197012081996031004	IV/d	Ketua	Pengadilan Negeri Bale Bandung
2.	MUHAMMAD IKHSAN FATHONI, S.H., M.H. NIP. 196906041996031001	IV/d	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
3.	ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., M.H. NIP. 197302101999031005	IV/d	Ketua	Pengadilan Negeri Sumber
4.	ASEP KOSWARA, S.H., M.H. NIP. 196812081994031001	IV/d	Ketua	Pengadilan Negeri Bogor
5.	Dr. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H. NIP. 197412131999032002	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
6.	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H. NIP. 197802152001121002	IV/c	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Depok
7.	RIOS RAHMANTO, S.H., M.H. NIP. 197402112000031003	IV/c	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Cibinong



<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Dr. YOGI DULHADI, SH., MH. NIP. 197912142002121001	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Indramayu
9.	TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. NIP. 197609192001122002	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Subang
10.	SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H. NIP. 197606132001121005	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Karawang
11.	RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H. NIP.197806172001121002	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Cianjur
12.	HERMAN SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 198110052006041003	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Banjar
13.	DEDE HALIM, S.H., M.H. NIP. 197512112001121001	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Cibadak
14.	HIMELDA SIDABALOK, S.H., M.H. NIP. 197609282001122002	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Sukabumi
15.	ANDRE TRISANDY, S.H., M.H. NIP. 197902262002121002	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Garut
16.	ROSNAINAH, S.H., M.H. NIP. 197708292001122003	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Ciamis
17.	TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. NIP. 198001232003122001	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Kuningan
18.	YOHANES FRANSISCUS TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. NIP. 197808212002121002	IV/b	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Bantul
19.	AGUS ARDIANTO, S.H., M.H. NIP. 197708242001121002	IV/b	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Cirebon



<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Dr. ZOYA HASPITA, S.H., M.H. NIP. 198007142002122003	IV/b	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Purwakarta
21.	SAENAL AKBAR, S.H., M.H. NIP. 198009152009041006	IV/a	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Sumedang
22.	HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. NIP. 198501212007041001	IV/a	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Majalengka
23.	MARYAM BROO, S.H., M.H. NIP.198012252007042001	IV/a	Hakim	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
24.	MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. NIP. 198101272009121003	IV/a	Hakim	Pengadilan Negeri Cikarang
25.	BRAM FAHMI, S.T., S.H., M.H. NIP. 198101222006041002	IV/c	Sekretaris	Pengadilan Tinggi Bandung
26.	WISNU GIRI PRASETYO, S.H. NIP. 197602272001121002	IV/b	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
27.	SUDRAJAT, S.E., M.M. NIP. 197204202006041001	IV/b	Sekretaris	Pengadilan Negeri Bale Bandung
28.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M. NIP. 198409132009041002	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Subang
29.	RAHMAT DARMADI, S.E. NIP. 197304162006041001	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Cianjur
30.	MARTHA G AMALO, S.E., M.H. NIP. 197907252009042001	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Cibadak



<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	ILHAM SAPUTRA, S.T., S.H. NIP. 198305142006041007	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Sukabumi
32.	ELA HANIPAH, S.E. NIP. 197212241992032001	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Garut
33.	JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M. NIP. 197906292005021001	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Kuningan
34.	MEILISA LYDYA, S.E., M.M.,S.H NIP. 198305112009122003	IV/a	Kepala Bagian Umum	Pengadilan Negeri Bekasi
35.	BAMBANG SAPTO UTOMO, S.E. NIP. 197105201998031009	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
36.	EE SUHENDRA, S.H. NIP. 198309112001121004	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Ciamis
37.	JAJANG SOFYAN, S.H. NIP. 197712062003121004	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Majalengka
38.	RENI KARTINI, S.H. NIP. 198204212006042004	III/d	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
39.	IWAN FERDIANA, S.H. M.H. NIP. 198212192008051001	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Karawang
40.	ERFIN FITRIADI, S.Kom. NIP. 197609272009041002	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Purwakarta



<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	AHMAD HALIMUDDIN, S.T., S.H.,M.H. NIP. 198302082011011009	III/d	Kepala Bagian Umum	Pengadilan Negeri Bandung
42.	NURLAELA RAMDANI, S.E NIP. 196911201992032005	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengadilan Negeri Cirebon
43.	YAYAN ANDRIYATI, S.H. NIP.196905111993032003	III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pengadilan Negeri Sumber
44.	SENDI SUSANDI, S.H. NIP. 198606192015031003	III/c	Sekretaris	Pengadilan Negeri Banjar
45.	KRIS RAHAJENG AYUNINGTYAS, A.Md. NIP. 199005052020122005	II/d	Arsiparis Terampil	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
46.	ASRI NUR SYAFITRI, S.Pd. NIP. 199802052025212019	IX	Operator – Penata Layanan Operasional	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
47.	AHMAD SUBEKTI, S.H. NIP. 197808152025211034	IX	Operator – Penata Layanan Operasional	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
48.	Posbakum Pengadilan Negeri Garut			



<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>GOL /RG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATKER</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	POTADS Jawa Barat			
50.	PPDI Cabang Garut			

